

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS,  
PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN  
KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS  
(Studi Kasus Pada KPP Kartasura)**



**NASKAH PUBLIKASI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

**MSY RIZKA PERMATASARI**

**B 200090143**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2014**

## HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan Skripsi dari mahasiswa:

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS (STUDI KASUS PADA KPP Kartasura)**

Yang ditulis oleh:

**MSY RIZKA PERMATASARI**

**B200090143**

Penandatanganan berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, 24 Desember 2014

Pembimbing Utama

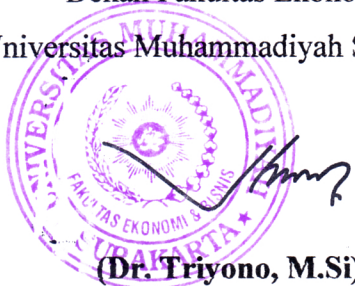


( Dr. Fatchan Achyani Akt. M.Si )

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, M.Si)

## ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas” (Survey di Wilayah KPP Surakarta). Penelitian Kuantitatif ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh: (1) Kesadaran Wajib Pajak, (2) Pelayanan Fiskus, (3) Pengetahuan Pajak, (4) Sanksi-sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan.

Penelitian ini menggunakan penelitian survey. Populasi dari penelitian ini adalah Wajib pajak yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Surakarta. Pengumpulan sampel dengan menggunakan koesioner. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu secara random (acak) dengan menggunakan 120 responden.

Dengan hasil analisis data menunjukkan hasil hipotesis (uji t) untuk Kesadaran diperoleh koefisien nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  ( $N=100$ :  $p= 5\%$ ) yaitu sebesar ( $3,354 > 1,985$ ) dengan demikian hipotesis Kesadaran diterima, maka Kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pelayanan Fiskus diperoleh koefisien nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  ( $N=100$ :  $p= 5\%$ ) yaitu sebesar ( $4,540 > 1,985$ ) dengan demikian hipotesis Pelayanan Fiskus diterima, maka Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan Pajak diperoleh koefisien nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  ( $N=100$ ,  $p= 5\%$ ) yaitu sebesar ( $3,333 > 1,985$ ) dengan demikian hipotesis Pengetahuan Pajak diterima, maka Pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Sanksi Pajak diperoleh koefisien nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  ( $N=100$ :  $p= 5\%$ ) yaitu sebesar ( $2,837 > 1,985$ ) dengan demikian hipotesis Sanksi pajak diterima, maka Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

***Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.***

## **A. PENDAHULUAN**

Menurut pengertiannya, Pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak dari segi ekonomis dan pajak dalam segi yuridis. Dalam segi ekonomis pajak adalah pengalihan kekayaan dari sektor swasta kepada pemerintah. Sedangkan menurut pengertian yuridis, pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan. Jadi pengertian menyeluruh dari pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara.

Menurut Soemahamidjaja mendefinisikan pajak Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum Sedangkan menurut Fieldmann dalam bukunya yang berjudul *De overheidsmiddelen van Indonesia*, Leiden (1949) memberikan batasan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa (menurut norma–norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra–prestasi, dan semata–mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan (UU No.28/2007 pasal 1 butir 6). Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak dapat memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti: sebagai

pembayar pajak dimuka (angsuran/kredit pajak) atas fiskal luar negeri yang dibayar sewaktu wajib pajak bertolak keluar negeri, memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS (Di Wilayah KPP Surakarta)”

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Kesadaran Wajib Pajak**

Ginintasari (2011) menjelaskan bahwa kesadaran adalah kondisi dimana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Dapat juga disimpulkan bahwa kesadaran adalah keadaan seseorang di mana ia tahu atau mengerti dengan jelas apa yang ada dalam pikirannya.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak yang berupa pandangan atau perasaan dengan melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran yang disertai dengan kecendrungan

untuk bertindak sesuai stimulasi yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

## **2. Pelayanan Fiskus**

Fiskus adalah seorang pegawai yang memiliki wewenang dalam pemungutan pajak dan dikenal dengan pejabat pajak. Jadi Pelayanan Fiskus adalah Orang atau badan yang mempunyai tugas untuk memungut pajak atau iuran kepada masyarakat (wajib pajak), yang gunanya untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional, dan untuk menyelenggarakan Pemerintahan (Kesit, 2009).

Terdapat pula hak-hak fiskus diatur dalam UU Perpajakan Indonesia yaitu:

- a. Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan.
- b. Hak menerbitkan surat ketetapan pajak.
- c. Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- d. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan.
- e. Hak menghapus atau mengurangi sanksi administrasi
- f. Hak melakukan penyelidikan
- g. Hak melakukan pencegahan
- h. Hak melakukan penyander

## **3. Pengetahuan Pajak**

Menurut UU KUP No 28 pasal 1 ayat 1 tahun 2007 yaitu Pajak merupakan iuran kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang, dimana tidak ada imbalan langsung bagi pembayarannya dan hasilnya untuk

membiayai pengeluaran umum negara yang dibayarkan atau disetorkan melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan, bukan kantor pelayanan pajak. Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Fungsi SSP sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

Hak dan kewajiban wajib pajak dalam pajak, sesuai pada UU nomor 6 Tahun 1983, yaitu:

**A. Kewajiban Wajib Pajak**

- a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Mengambil, mengisi, menanda tangani serta memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT).
- c. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya.
- d. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- e. Melayani dengan baik terhadap pemeriksa pajak yang melakukan pemeriksaan terhadap dirinya.

**B. Hak Wajib Pajak**

- a. Menunda pemasukan Surat Pemberitahuan (SPT)
- b. Melakukan pembetulan terhadap Surat pemberitahuan yang telah dimasukkan.
- c. Meminta penundaan pembayaran pajak.

- d. Meminta kembali atau melakukan kompensasi terhadap kelebihan pembayaran pajak.
- e. Mengajukan keberatan atas penetapan pajak.
- f. Mengajukan banding atas keputusan keberatan.
- g. Mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi.
- h. Memperoleh penerangan, pelayanan, dan perlindungan atas rahasia dirinya.

#### **4. Sanksi Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006). Macam-macam pajak yaitu:

##### **1. Sanksi Administrasi**

- a. Sanksi denda
- b. Bunga 2% per bulan
- c. Kenaikan

##### **2. Sanksi Pidana**

- a. Denda pidana
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana penjara



## **5. Kepatuhan Wajib Pajak**

Sesuai dengan pernyataan Puput dan Nashih (2005), kepatuhan secara administratif diketahui dari pengajuan pembayaran tepat waktu yaitu penyampaian Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT). Sedangkan kepatuhan secara teknis adalah teknis penghitungan pajak yang harus dibayar sesuai dengan *actual income* berdasar pada tarif pajak. Dalam prinsip pemungutan pajak tersebut, wajib pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang (*Self assessment system*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga peraturan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri, selain itu wajib pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Zain,2003:111).

## **6. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas**

Menurut UU KUP No 28 Pasal 1 ayat 24 tahun 2007 tentang Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat dengan pemberi kerja. Definisi menjalankan kegiatan usaha dimaksud adalah usaha apapun diberbagai bidang, baik pertanian, industri, perdagangan maupun yang lainnya. Sedangkan pekerjaan bebas umumnya terkait dengan keahlian atau profesi yang dijalankan sendiri oleh tenaga ahli yang

bersangkutan antara lain: pengacara, akuntan, konsultan, notaris, atau dokter. Maksudnya, pelaku pekerjaan bebas tersebut membuka praktek sendiri dengan nama sendiri.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif, dimana metode yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah metode survei. Penelitian survei menurut Singarimbun (1995:3), adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok, dimana Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan dijawab oleh responden, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas.

Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang berada di wilayah Surakarta.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004) kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian yaitu: Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kesadaran wajib pajak, Pelayanan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

#### 1. Hasil Uji hipotesis 1

Hasil uji t untuk hipotesis 1 pada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,354 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,985 dan nilai probabilitas 0,001 yang nilainya lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  terdukung secara statistik artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Surakarta.

Kesadaran Wajib pajak mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan pajak. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya keterkaitan antara persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, juga keadilan (fairness) dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Prasetyo (2006) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik usaha kecil menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakan di daerah Jogjakarta. Analisis data yang dilakukan adalah teknik analisis regresi linear berganda dengan hasil bahwa

pengetahuan wajib pajak tentang pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak, dan sifat optimis wajib pajak terhadap pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran perpajakan wajib pajak.

## 2. Hasil Uji Hipotesis 2

Hasil uji  $t$  untuk hipotesis 2 pada pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,540 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,985 dan nilai probabilitas 0,000 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  terdukung secara statistik artinya pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Surakarta.

Pelayanan Fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan pajak. Karena sikap fiskus berpengaruh terhadap minat dan kemauan wajib pajak dalam menjalankan kesadaran mereka sebagai wajib pajak, karena melalui fiskus wajib pajak dapat berinteraksi langsung dalam mempertanyakan masalah yang menyangkut pelayanan dalam perpajakan.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Arum dan Zulaikha (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP

Pratama Cilacap. Dalam penelitian ini mereka memiliki kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin baik pelayanan fiskus, dan semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap sanksi pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

### 3. Hasil Uji Hipotesis 3

Hasil uji t untuk hipotesis 3 pada pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,333 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,985 dan nilai probabilitas 0,001 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  didukung secara statistik artinya pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Surakarta.

Pengetahuan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan pajak, karena Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas, cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka akan pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Supriyati dan Hidayat (2008) melakukan penelitian tentang Pengetahuan dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penelitian ini, mereka menyebarkan kuesioner sebanyak 78 kuesioner kepada wajib pajak badan di KPP Sidoarjo Timur, dan memiliki kesimpulan bahwa Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Persepsi Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### 4. Hasil Uji Hipotesis 4

Hasil uji t untuk hipotesis 4 pada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,837 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,985 dan nilai probabilitas 0,006 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  didukung secara statistik artinya sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Surakarta.

Sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan pajak. Karena telah tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada, takut akan sanksi yang akan didapatkan jika melanggar peraturan yang tercantun dalam peraturan perpajakan dalam undang-undang.

Hasil penelitian ini konsisten dengan Penelitian Musyarofah dan Purnomo (2008) yang meneliti tentang Kesadaran, Persepsi Tentang Sanksi dan Hasrat Membayar Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,

mendapatkan kesimpulan bahwa Kesadaran Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Persepsi Tentang Sanksi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Hasrat Membayar Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### D. KESIMPULAN

**Tabel Hasil Uji t**

Variabel	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Sig	Keterangan
KSWP	3,354	1,985	0,001	H <sub>1</sub> diterima
PF	4,540	1,985	0,000	H <sub>2</sub> diterima
PWP	3,333	1,985	0,001	H <sub>3</sub> diterima
SSP	2,837	1,985	0,006	H <sub>4</sub> diterima

**Sumber data diolah, 2013**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat ditarik kesimpulan:

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah diperoleh nilai thitung sebesar 3,354 lebih besar dari ttabel sebesar 1,985 dan nilai probabilitas 0,001 yang nilainya lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> terdukung secara statistik artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Surakarta.
2. Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai thitung sebesar 4,540 lebih besar dari ttabel sebesar 1,985 dan nilai

probabilitas 0,000 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  didukung secara statistik artinya pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Surakarta.

3. Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai thitung sebesar 3,333 lebih besar dari ttabel sebesar 1,985 dan nilai probabilitas 0,001 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  didukung secara statistik artinya pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Surakarta.
4. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai thitung sebesar 2,837 lebih besar dari ttabel sebesar 1,985 dan nilai probabilitas 0,006 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  didukung secara statistik artinya sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Surakarta.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Arum, Zulaikha. 2012. “Pengaruh kesadaran wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas”. <http://ejournal-s1.undip.ac.id> . Diponegoro Jurnal of Accounting, vol.1, no.1, 2012 : 1-8.
- Gardina, Haryanto. 2011. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol 13, no.2, November 2011.
- Handayani, I G. A. Ayu Ngr Adhi. 2009. “Pengaruh Tanggung Jawab Moral dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Barat”. *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Indriantoro, Nur, Bambang Supomo, (2009), *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*, Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Jatmiko, A.N. 2006. “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)”. Tesis Megister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Kesit, B. 2009. “*Hukum Pajak*. Universitas Islam” Indonesia Fakultas Ekonomi, Jogjakarta 2009.
- Kusniawati. 2010. “*Metodologi Penelitian, Penarikan Sample*”. <http://rinakusniawati.blogspot.com/2010/04/penarikan-sampel.html>.
- Mardiasmo. 2006. “*Perpajakan (edisi revisi 2006)*”. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Mujiyati, Aris. 2010. “*Perpajakan (Pendekatan Teori dan Soal Latihan)*”. Surakarta: Penerbit Muhammadiyah Universty Press UMS, Surakarta.

- Musyarokah, Purnomo. 2008. “ *Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Tentang Sanksi, dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi Kasus pada KPP Gubek Surabaya)*”. *JAMBSP* Vol. 5 No. 1 – Oktober 2008: 34 – 50
- Prasetyo, F.D. 2006. ” *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Daerah Jogjakarta (Studi Kasus pada Usaha Coffeeshop di Derah Jogjakarta)*”. Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
- Sambodo, A. 1999. “*Kewajiban Perpajakan Bagi Badan dan Orang Pribadi. Tinjauan dari sisi Wajib Pajak (edisi pertama.1999)*”. Yogyakarta: Penerbit BPFE Yogyakarta.
- Sekaran, Uma. 2000. “*Research Methods for Business, A Skill-Building Approach*”. America: Thirt Edition, John Wiley & Sons, Inc.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Supriyadi, Hidayat. 2008. “*Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”. *Jurnal Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, vol.7, no.1, Mei 2008 : 41-50.
- Surantono, Muljadi. 1993. “*Pengetahuan Praktis Perpajakan*”. Yogyakarta: Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Unikom Elib. (2012). Microsoft Power Point Pertemuan 6. pptx, <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=110228.html>